

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Jokowi-JK sebagai pemenang Pemilu Tahun 2014 pada Debat Capres dan Cawapres mengungkapkan 56 janji politik. Janji tersebut terbagi menjadi lima bidang yakni dua belas janji dalam bidang demokrasi, pemerintahan yang bersih dan penegakan hukum, sepuluh janji dalam bidang ekonomi dan kesos, dua belas janji dalam bidang politik internasional dan ketahanan nasional, delapan janji dalam bidang SDM dan Iptek, serta empat belas janji dalam bidang pangan, energi dan lingkungan hidup. Janji politik tersebut merupakan modal yang diberikan Paslon Jokowi-JK pada saat kampanye untuk mendulang suara demi memenangkannya dalam Pilpres 2014 dan secara tidak langsung menjadi kontrak tidak tertulis antara Jokowi-JK dengan rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan.

Janji Politik yang telah diungkapkan sebagian besar tercantum dalam RPJMN 2015-2019 sebagai bentuk pemenuhan amanat Undang-Undang. RPJMN kemudian menjadi patokan bagi kementerian/lembaga negara untuk dijadikan pedoman dan patokan dalam menjalankan rencana strategisnya. Meskipun sebagian besar janji politik yang diungkapkan tercantum dalam RPJMN, terdapat beberapa janji politik yang tidak tercantum di RPJMN atau tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan.

Secara umum Jokowi-JK telah melaksanakan janji politik yang diungkapkannya pada debat capres 2014 terbukti dengan dilaksanakannya 43 janji politik. Janji yang dilaksanakan tersebut mencapai 76,79% dari 56 janji politik yang telah diungkapkan, meski tidak dilaksanakan seluruhnya, Jokowi-JK telah mencapai hasil yang baik dengan terlaksananya janji politik lebih dari 75%. Realisasi janji politik ini dinilai merupakan capaian yang baik dan telah mampu menarik hati pemilih untuk mendulang suara pada Pemilu berikutnya. Terbukti dengan jumlah suara Jokowi yang justru meningkat pada Pilpres 2019.

Janji politik yang tidak dilaksanakan Jokowi yakni sebanyak 13 janji. Realisasi janji yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang telah diungkapkan pada saat kampanye hal ini menjawab bahwa apa dilakukan Jokowi-JK pada realisasi ke-13 janji tersebut tidak relevan dengan kepentingan pemilih dan bertolak belakang dengan apa yang diungkapkannya pada saat kampanye.

Ketidaksesuaian antara janji dengan realisasinya juga memberikan pengertian bahwa apa yang diungkapkan Paslon pada kampanye memiliki niat awal untuk mengiming-imingi pemilih dengan berbagai harapan yang diungkapkan dengan melebih-lebihkan atau membuatnya menjadi sebuah janji yang menarik dan dapat mendulang suara pemilih.

#### 4.2.     **Saran**

Setelah mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian, peneliti memiliki beberapa saran, yakni : Pertama kepada peserta Pemilu agar memegang teguh janji yang diungkapkan untuk dapat dilaksanakan pada saat menjabat sebagaimana seperti yang dijanjikan pada saat kampanye dengan tidak menjadikan janji politik sebagai kendaraan untuk memenangkan konstestasi Pemilu saja tetapi mesti dijadikan sebagai produk kebijakan. Selain itu penting pula untuk memastikan janji politik yang diusung saat kampanye dapat realistis untuk dilaksanakan dengan melakukan riset mendalam tentang kondisi terkini dan keberjalanan pemerintahan sebelumnya. Kedua kepada masyarakat diharapkan dapat mengawasi jalannya pemerintahan agar sesuai dengan janji-janji politik yang telah diungkapkan pejabat publik pada saat kampanye dengan mengetahui dan memahami janji politik yang sebelumnya diungkapkan saat kampanye dan membandingkannya dengan pelaksanaan kebijakannya kemudian memberikan ‘hukuman’ apabila janji yang dipilih tidak dilaksanakan dengan tidak memilihnya kembali pada pemilu berikutnya. Masyarakat sebagai pemilih juga perlu hati-hati dalam menentukan pilihan saat Pemilu yakni tidak mudah percaya pada janji politik yang diungkapkan, diharapkan pemilih dapat memahami janji yang diungkapkan dan diusung, kemudian mencermati apakah janji tersebut relevan dengan keadaan saat ini dan apakah menjadi realistis untuk dilaksanakan dikemudian hari dan menjadikannya bahan pertimbangan dalam memilih.